

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara tertua di kawasan Afrika, Ethiopia memiliki sejarah politik kompleks serta ketegangan antar etnis yang berakar dari permasalahan pembagian kekuasaan dan peran negara dalam kehidupan masyarakat.¹ *Tigray People's Liberation Front* (TPLF), yang merupakan partai politik dominan di wilayah Tigray, memainkan peran sentral dalam politik Ethiopia selama beberapa dekade. TPLF merupakan bagian dari koalisi *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF) yang memerintah Ethiopia dari tahun 1991 hingga 2018 dibawah kepemimpinan Mengistu Haile Mariam.² Namun, dengan naiknya Perdana Menteri Abiy Ahmed pada tahun 2018, TPLF kehilangan pengaruhnya di pemerintah federal Ethiopia, yang memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan wilayah Tigray.³

Pasca naik ke tampuk kekuasaan, Abiy Ahmed segera membentuk koalisi baru yang disebut *Prosperity Party* (Partai Kemakmuran) dengan tujuan untuk menyatukan bangsa dan menerapkan reformasi ekonomi liberal, serta memberikan lebih banyak ruang kepada sektor swasta. Etnis Tigray yang merasa otonomi mereka terancam segera bergerak untuk menantang pemerintah pusat. TPLF kemudian memutuskan meninggalkan koalisi yang telah direorganisasi dengan menganggap bahwa kebijakan federal yang mereka terapkan sejak tahun 1991

¹ Alene Kassaw & Mbabazi Veneranda, "TPLF'S Annexation of Wolkait, Ethiopia: Motivations, Strategies, and Interests," *Cogent Social Science*, 10(1) (2024): 1-15.

² Human Rights Watch: World Report 1997 (Ethiopia: Human Rights Watch World Report, 1997), 9-16, accessed on September 21, 2024, <https://www.hrw.org/reports/1997/ethiopia/Ethio97d.htm>.

³ Lauren Ploch Blanchard, "Ethiopia's Transition and the Tigray Conflict," *Congressional Research Service* (2021): 3-9.

adalah cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah perpecahan etnis yang mendalam di negara tersebut.⁴

Ketegangan antara Tigray dan Abiy Ahmed semakin memuncak pada bulan September 2020 ketika wilayah Tigray tetap mengadakan pemilihan umum lokal meski pemerintah federal Ethiopia telah menunda pemilu akibat kekhawatiran akan pandemi COVID-19.⁵ Akibatnya, Perdana Menteri Abiy Ahmed menyatakan bahwa pemilu yang dilakukan etnis Tigray tersebut tidak sah dan ilegal, serta melakukan pemotongan anggaran untuk kepemimpinan Tigray sebagai bentuk hukuman. Melihat tindakan tersebut, TPLF mengatakan bahwa hal ini sama dengan deklarasi perang, sehingga dua bulan kemudian, TPLF menyerbu pangkalan militer pemerintah di luar Kota Mekelle. Pasca serangan tersebut, Abiy Ahmed segera memerintahkan tindakan militer terhadap pasukan Tigray, yang menandai dimulainya perang saudara tersebut dan dengan cepat berubah menjadi konflik kemanusiaan yang parah.⁶

Konflik ini tidak hanya melibatkan TPLF dan pasukan federal Ethiopia tetapi juga menarik keterlibatan Eritrea, yang memiliki hubungan yang rumit dengan TPLF. Eritrea, sebagai musuh lama TPLF, memanfaatkan konflik Tigray ini sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Keterlibatan Eritrea dalam konflik ini bertujuan untuk mengakhiri isolasi internasional yang dialami Eritrea sehingga Eritrea dapat menjadi negara yang lebih unggul di kawasan

⁴ Peter Danssaert, "A Timeline of the Tigray Conflict," *International Peace Information Service (IPIS)*, February 21, 2022, accessed August 1, 2024, <https://www.peaceau.org/en/article/panel-of-the-wise>.

⁵ Tsedale Lemma, "After the Postponed Elections: Ethiopia's Fragile Transition Hangs in the Balance", August 24, 2020, accessed November 11, 2024, <https://blog.bti-project.org/2020/08/24/ethiopias-fragile-transition-hangs-in-the-balance/>.

⁶ Israel Nyaburi Nyadera & Censu Osedo, "Civil War Between the Ethiopian Government and the Tigray People's Liberation Front: A Challenge to Implement the Responsibility to Protect Doctrine," *African Journal on Conflict Resolution*, 23(1) (2023): 35-56.

Tanduk Afrika. Ethiopia mendominasi sektor ekonomi, militer, dan diplomatik di kawasan Tanduk Afrika, sehingga Eritrea menghadapi tantangan untuk mengalahkan Ethiopia yang kuat dan bersatu. Keterlibatan Eritrea dan blokade kemanusiaan yang diberlakukan oleh Pemerintah Ethiopia memperburuk situasi, menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius di Tigray.⁷

Sebagai organisasi regional yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Afrika, Uni Afrika (*African Union*) memainkan peran sentral dalam menangani konflik di benua ini. Uni Afrika didirikan dengan tujuan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika.⁸ Uni Afrika mengusung prinsip *African solutions to African problems* yang mendorong negara-negara Afrika untuk menyelesaikan konflik internal dan regional tanpa dominasi kekuatan eksternal. Konflik Tigray terjadi dalam wilayah Afrika dan melibatkan negara anggota Uni Afrika, sehingga Uni Afrika menjadi aktor yang paling sah dan relevan untuk melakukan intervensi dan mediasi.

Uni Afrika memiliki pengalaman panjang dalam mediasi konflik dan agenda perdamaian melalui mekanisme, seperti *African Peace and Security Architecture* (APSA). Melalui mekanisme APSA, Uni Afrika memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik.⁹ Dalam pengimplementasiannya, APSA mencakup lima strategi prioritas, yaitu: *Conflict Prevention* (Pencegahan Konflik), *Conflict Management* (Manajemen Krisis/Konflik), *Post-Conflict Reconstruction and Peace Building* (Rekonstruksi

⁷ Noverino Faiz Adi Muhammad, dkk, "Unraveling the Political Motives of Eritrea in the Tigray Conflict", *Andalas Journal of International Studies*, 8 (1), 2024, 19-27.

⁸ "About the African Union", African Union, accessed November 11, 2024, <https://au.int/en/overview>.

⁹ "African Peace and Security Architecture", African Union, accessed November 11, 2024, www.peaceau.org.

Pasca-Konflik dan Pembangunan Perdamaian), *Strategic Security Issues* (Isu-isu Keamanan Strategis), dan *Coordination and Partnership* (Koordinasi dan Kemitraan).¹⁰ Strategi ini sesuai dengan visi Uni Afrika untuk mencapai Afrika yang terpadu, makmur dan damai, digerakkan oleh warga negaranya sendiri dan mewakili kekuatan dinamis di arena global) melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif (*an integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in global arena*).¹¹

Konflik Tigray menjadi ujian besar bagi Uni Afrika. Sejak awal konflik, Uni Afrika telah berusaha melakukan mediasi dan mendorong dialog antara pemerintah Ethiopia dan TPLF. Uni Afrika, melalui Dewan Perdamaian dan Keamanan (*Peace Security Council*), telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Uni Afrika memainkan peran kunci dalam menangani konflik Tigray, meski menghadapi tantangan yang signifikan. Peran Uni Afrika termasuk fasilitator, mediator, rekonsiliator, monitor, dan verifikator. Uni Afrika bahkan menunjuk mantan Presiden Nigeria, Olusegun Obasanjo, sebagai Utusan Khusus untuk *Horn of Africa* (wilayah Tanduk Afrika), dengan mandat memfasilitasi dialog antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.¹² Namun, keberhasilan peran Uni Afrika terhambat oleh ketidakmauan pihak-pihak yang bertikai untuk berkompromi, keterlibatan Eritrea, dan ketegangan politik yang mendalam.

¹⁰ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020* (Addis Ababa: African Union Commission, 2015), 22.

¹¹ "Vision and Mission", African Union, accessed November 11, 2024, <https://au.int/en/about/vision>.

¹² "AU launches peace talks to end the conflict in the Tigray Region of Ethiopia", African Union, accessed November 11, 2024, <https://au.int/en/pressreleases/20221025/au-launches-peace-talks-end-conflict-tigray-region-ethiopia>.

Konflik Tigray menjadi ujian penting bagi APSA dalam mencapai tujuan perdamaian dan keamanan di Afrika. APSA dirancang untuk menangani konflik melalui pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, manajemen krisis, dan rekonstruksi pasca-konflik. Dalam konteks Tigray, Uni Afrika telah mencoba menerapkan strategi-strategi ini, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas. Misalnya, upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini (*early warning system*) dan diplomasi preventif tidak berhasil mencegah pecahnya kekerasan.¹³ Namun, Uni Afrika terus berupaya menyelesaikan konflik dan mendorong resolusi damai, mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip APSA.

Selain itu, meskipun perjanjian damai telah dicapai, ancaman terhadap stabilitas jangka panjang masih ada. Ketegangan politik di Ethiopia, terutama terkait dengan pembagian kekuasaan di tingkat nasional, masih berpotensi memicu ketidakstabilan baru. Uni Afrika harus memastikan bahwa mekanisme-mekanisme perdamaian yang diterapkan pasca-konflik, termasuk reformasi politik yang inklusif, mampu mencegah kembalinya konflik di masa depan.

Peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia mencerminkan upaya kawasan ini untuk mencapai perdamaian melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, Uni Afrika terus berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan Afrika sesuai visi dan tujuan awal yang ingin dicapai. Konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat kerangka kerja perdamaian dan keamanan Afrika untuk menangani konflik-konflik kompleks di masa depan.

¹³ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020* (Addis Ababa: African Union Commission, 2015), 22.

1.2. Rumusan masalah

Konflik bersenjata antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia pada tahun 2020 menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas kawasan Afrika dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu konflik kemanusiaan terbesar di Afrika.¹⁴ Situasi ini tentunya membutuhkan tindak lanjut dari Uni Afrika sebagai organisasi regional kawasan, seiring dengan tujuan Uni Afrika untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Mengusung prinsip *African solutions to African problems*, Uni Afrika mendorong negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan konflik internal dan regional tanpa dominasi kekuatan eksternal. Uni Afrika juga memiliki mandat legal dan politis untuk melakukan intervensi dalam konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan, termasuk pelanggaran HAM berat dan potensi genosida, melalui Pasal 4(g) dan 4(h) Konstitusi Uni Afrika. Selain itu, Uni Afrika dinilai lebih netral oleh negara-negara anggota dibandingkan aktor global karena didirikan berdasarkan prinsip kedaulatan dan solidaritas antar negara Afrika

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu bagaimana peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik antara *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) dan Pemerintah Ethiopia pada tahun 2020-2024?

¹⁴ Al Mayadeen English, "War in Tigray may have killed 600.000 people: Peace Mediator", *Al Mayadeen English*, January 16, 2023, accessed November 11, 2024, <https://english.almayadeen.net/news/politics/war-in-tigray-may-have-killed-600000-people:-peace-mediator>.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik antara *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) dan Pemerintah Ethiopia pada tahun 2020-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang ingin dibahas, diharapkan memberi manfaat, diantaranya:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di negara-negara anggotanya, khususnya terhadap pengimplementasian strategi *African Peace and Security Architecture* (APSA) sebagai kerangka kerja yang dibentuk oleh Uni Afrika untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kompleksitas konflik serta tantangan yang dihadapi oleh Uni Afrika selaku organisasi regional dalam menangani konflik yang terjadi di kawasannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perdamaian dan keamanan di Afrika, serta peran Uni Afrika dalam mencapainya. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam upaya perdamaian.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai acuan dalam mengkaji masalah yang akan dibahas. Studi pustaka merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai materi, seperti dokumen, buku, dan situs internet. Studi ini bertujuan sebagai bahan referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, guna mendapat teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁵ Hasil studi ini kemudian akan ditelaah dan dikembangkan sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat.

Dalam menjawab penelitian mengenai peran Uni Afrika dalam konflik antara *Tigray People's Liberation Front (TPLF)* dan Pemerintah Ethiopia, terdapat beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Artikel pertama yang digunakan merujuk pada artikel berjudul "*Tigray Conflict and the Crisis of Nation Building in Ethiopia: the Role of African Union*" yang ditulis oleh Nicholas Idris Arameh dan Victor Ojakoratu. Artikel ini mencakup berbagai penelitian yang berfokus pada konflik antara Ethiopia-Tigray serta keterlibatan Uni Afrika dalam penyelesaian konflik dan upaya pembangunan bangsa di Afrika.¹⁶ Artikel ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Uni Afrika dalam mengatasi konflik secara efektif, seperti masalah kedaulatan,

¹⁵ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1) (2020): 41-53.

¹⁶ Nicholas Idris & Victor Ojakoratu, "Tigray Conflict and the Crisis of Nation Building in Ethiopia: the Role of African Union," *Journal of Nation Building & Policy Studies (JoNPS)* (2022): 57-80.

kurangnya pemanfaatan kerangka kerja utama, seperti *Panel of the Wise* (panel beranggotakan lima orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Afrika yang sangat dihormati dari berbagai lapisan masyarakat yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap perdamaian, keamanan dan pembangunan di benua tersebut, dengan tugas untuk mendukung upaya *Peace and Security Council* (PSC) dan Ketua Komisi, khususnya di bidang pencegahan konflik),¹⁷ serta kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya kerjasama antar negara anggota dan perlunya evaluasi ulang pendekatan Uni Afrika dalam penyelesaian konflik guna mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian guna membahas secara mendalam tentang peran Uni Afrika dalam menangani konflik Tigray, sekaligus menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh Uni Afrika dalam melaksanakan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Afrika. Salah satu hal penting yang diungkapkan adalah ketidakmampuan Uni Afrika untuk menerapkan *Constitutive Act* dengan tegas, khususnya Pasal 4(g) dan (h), yang memungkinkan intervensi ketika terjadi kekerasan massal terhadap penduduk sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Uni Afrika memiliki mekanisme legal untuk melakukan pembangunan perdamaian, kelemahan dalam implementasinya menimbulkan hambatan serius bagi penyelesaian konflik.

Selain itu, artikel ini menggarisbawahi kurangnya keinginan politik (*political will*) di antara negara-negara anggota Uni Afrika sebagai penghambat utama bagi intervensi yang lebih kuat. Meskipun Uni Afrika berusaha mengatasi konflik melalui mediasi, dukungan politik yang minim dan prinsip kedaulatan

¹⁷ Limi Mohammed, "Panel of Wise," *African Union*, April 24, 2018, accessed August 5, 2024, <https://www.peaceau.org/en/article/panel-of-the-wise>.

negara sering kali membatasi langkah-langkah yang lebih tegas. Artikel ini mengaitkan konflik ini dengan krisis pembangunan bangsa di Ethiopia, di mana ketegangan etnis yang mendalam menjadi hambatan bagi stabilitas dan pembangunan. Hal ini relevan dengan penelitian yang menilai bagaimana Uni Afrika dapat mendukung proses rekonsiliasi pasca-konflik. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan perspektif berharga tentang tantangan dan keterbatasan yang dihadapi Uni Afrika dalam mencapai perdamaian berkelanjutan di Ethiopia, yang mendukung fokus penelitian terhadap peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.

Artikel kedua yang digunakan berjudul “*Human Rights in Ethiopia: the Tigray Conflict (2020-2022)*” yang ditulis oleh Emmanuel Mamadi.¹⁸ Artikel ini menjabarkan mengenai konflik antara Etnis Tigray dan Pemerintah Ethiopia yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2022 dan menjadi pusat perhatian internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan krisis kemanusiaan yang ditimbulkannya. Konflik tersebut mengakibatkan kekejaman yang meluas termasuk pembunuhan yang tidak proporsional, pembantaian, kekerasan seksual dan berbasis gender, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Periode ini menandai krisis kemanusiaan yang signifikan, yang mengakibatkan jutaan pengungsi dan pengungsi internal, serta pembatasan kebebasan media dan komunikasi. Akar konflik dapat ditelusuri kembali ke sejarah perpecahan etnis di Ethiopia, yang memperburuk ketegangan dan perebutan kekuasaan.

¹⁸ Emmanuel Mamadi, “Human Rights in Ethiopia: The Tigray Conflict (2020-2022),” *Yildiz Teknik Universitesi* (2023): 1-15.

Artikel ini turut membahas mengenai tanggapan internasional terhadap konflik Tigray mencapai puncaknya pada perundingan damai pada tahun 2022 dan kemudian dimediasi oleh Uni Afrika, yang mencerminkan upaya bersama komunitas global untuk mengatasi krisis tersebut. Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan dukungan untuk mengakhiri konflik. Namun, meskipun terdapat intervensi-intervensi tersebut, masih ada tantangan dalam memastikan keberlanjutan perdamaian dan mengatasi penyebab utama konflik. Kompleksitas situasi ini semakin diperparah oleh faktor-faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19 dan kelaparan, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan solusi komprehensif dan jangka panjang untuk mencegah krisis kemanusiaan di masa depan di kawasan ini.¹⁹

Artikel mengenai konflik Tigray menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh Uni Afrika dalam memediasi perundingan damai dan upaya internasional untuk menyelesaikan krisis tersebut. Dengan mengkaji dampak intervensi Uni Afrika terhadap konflik, penulis dapat mengevaluasi efektivitas inisiatif diplomatik tersebut dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tinjauan atas temuan studi pustaka ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai hasil upaya mediasi Uni Afrika, menyoroti tantangan yang dihadapi, keberhasilan yang dicapai, dan bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan perdamaian berkelanjutan antara Tigray dan Ethiopia. Analisis ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian konflik dalam konteks Afrika dan memberikan

¹⁹ Emmanuel Mamadi, *Human Rights in Ethiopia: The Tigray Conflict (2020-2022)*.

masukannya bagi strategi masa depan untuk mencegah krisis serupa di wilayah tersebut.

Artikel ketiga yang digunakan berjudul “*Ethiopia’s Transition and the Tigray Conflict*” yang ditulis oleh Lauren Ploch Blanchard.²⁰ Artikel ini membahas mengenai bagaimana Konflik di wilayah Tigray di Ethiopia, yang dimulai pada november 2020, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan ketidakstabilan regional yang signifikan. Konflik tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah federal Ethiopia, pemberontak Tigray yang dipimpin oleh TPLF dan pasukan Eritrea. Situasi ini telah mengakibatkan kejahatan yang meluas, termasuk pembantaian massal, pemerkosaan, pembersihan etnis, dan pembatasan ketat terhadap bantuan kemanusiaan.

Uni Afrika dan Amerika Serikat telah mengambil tindakan untuk mengatasi krisis ini, termasuk menjatuhkan sanksi dan menyerukan perundingan gencatan senjata. Pemerintahan Biden telah menyerukan penarikan pasukan dari wilayah tersebut dan menanggukkan sejumlah bantuan ke Ethiopia karena pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari upaya-upaya ini, akses terhadap bantuan di Tigray masih terbatas, dan konflik terus berlanjut dengan operasi militer yang sedang berlangsung dan perselisihan mengenai wilayah. Intervensi Uni Afrika dalam konflik Tigray-Ethiopia telah menjadi aspek penting dalam respons internasional terhadap krisis tersebut. Uni Afrika telah berusaha untuk menengahi pihak-pihak yang berkonflik dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat Ethiopia dan Eritrea yang terlibat dalam konflik tersebut.

²⁰ Lauren Ploch Blanchard, *Ethiopia’s Transition and the Tigray Conflict*.

Namun, efektivitas intervensi Uni Afrika dibatasi oleh beberapa faktor, seperti sulitnya mencapai konsensus mengenai situasi di Tigray antara Uni Afrika dan Dewan Keamanan PBB, adanya blokade dan pembatasan yang dilakukan pemerintah Ethiopia dengan membatasi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, penerapan sanksi dan tekanan diplomatik yang belum cukup untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk menghentikan permusuhan dan terlibat dalam perundingan yang berarti, serta intervensi Uni Afrika belum sepenuhnya mengatasi dinamika regional yang lebih luas, yang terus mempersulit penyelesaian konflik.²¹

Artikel ini bermanfaat untuk mengetahui bahwa meskipun intervensi Uni Afrika dalam konflik Tigray-Ethiopia telah menjadi komponen penting dalam respons internasional, efektivitasnya dibatasi oleh kurangnya konsensus, terbatasnya akses kemanusiaan, dan tidak memadainya tekanan diplomatik. Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan ketidakstabilan regional menggarisbawahi perlunya tindakan yang lebih terkoordinasi dan tegas untuk mengatasi konflik dan dampaknya yang lebih luas.

Artikel keempat yang digunakan merujuk pada artikel berjudul “*African Agency in R2P: Interventions by African Union and ECOWAS in Mali, Cote D’Ivoire, and Libya*” yang ditulis oleh Kwesi Aning dan Fiiifi Edu-Afful.²² Penelitian ini membahas mengenai penerapan undang-undang konstitutif Uni Afrika pasal 4(h) tahun 2000, yang telah mengubah prinsip Uni Afrika dari *non-interference* menjadi prinsip *non-indifference*. Prinsip *non-indifference* yang diterapkan ini memberi wewenang kepada Uni Afrika untuk melakukan intervensi

²¹ Lauren Ploch Blanchard, *Ethiopia’s Transition and the Tigray Conflict*.

²² Kwesi Aning & Fiiifi Edu-Afful, “African Agency in R2P: Interventions by African Union and ECOWAS in Mali, Cote D’Ivoire, and Libya,” *International Studies Review*, 18(1) (2016): 120-133.

terhadap negara-negara anggotanya yang melakukan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²³

Selain itu, artikel ini juga membahas mengenai kerjasama antara Uni Afrika dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS) dalam menerapkan *Responsibility to Protect* (R2P) untuk menjaga keamanan kawasan Afrika dan meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil yang diakibatkan oleh konflik.²⁴

Penelitian ini menjabarkan terkait peran Uni Afrika bersama ECOWAS dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian operasi di benua Afrika. Meskipun kedua organisasi ini belum secara efektif menerapkan R2P dan melawan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terlihat dalam konflik di Mali, Cote D'Ivoire, dan Libya, baik Uni Afrika dan ECOWAS tetap berusaha untuk bersikap tegas dan menerapkan prinsip serta norma yang telah tertuang dalam *Constitutive Act* dan mekanismenya.

Artikel ini menggambarkan tentang perubahan prinsip yang dianut oleh Uni Afrika serta penerapannya dalam upaya untuk menyelesaikan konflik negara anggotanya. Artikel ini juga menunjukkan meskipun prinsip *non-indifference* yang digunakan Uni Afrika bertujuan untuk menjaga perdamaian negara-negara anggotanya, namun Uni Afrika masih mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya, serta munculnya kekuatan global yang berupaya melemahkan peran lembaga Uni Afrika. Artikel ini digunakan sebagai acuan untuk melihat tantangan dan hambatan yang dialami Uni Afrika dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta upaya yang

²³ African Union, *Constitutive Act of African Union* (Lome: African Union, 2000).

²⁴ Kwesi Aning & Fiifi Edu-Afful, *op.cit*, page 1-3.

dilakukan Uni Afrika untuk tetap bersikap tegas dan menerapkan prinsip yang dianutnya.

Artikel kelima yang digunakan berjudul “*African Peace and Security Architecture: APSA Roadmap 2016-2020*” yang ditulis oleh African Union Commission. Artikel ini menyediakan strategi komprehensif untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan di Afrika, dengan fokus pada pencegahan konflik, manajemen krisis, rekonstruksi pasca-konflik, dan masalah keamanan strategis, yang diuraikan dalam lima bidang fokus strategis, yaitu pencegahan konflik, manajemen krisis dan konflik, rekonstruksi pasca-konflik dan pembangunan perdamaian, masalah keamanan strategis, serta koordinasi dan kemitraan.²⁵

APSA Roadmap berkontribusi dinilai relevan dalam hal manajemen krisis dan konflik serta pencegahan konflik dalam studi kasus konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia. *APSA Roadmap* menyoroti peran penting Uni Afrika dalam sistem peringatan dini (*early warning system*), diplomasi preventif, dan mediasi serta resolusi konflik intra-negara. Misalnya, peran Uni Afrika dalam pencegahan dan pengelolaan krisis di negara-negara anggota Afrika dapat dikaitkan dengan keterlibatannya dalam konflik Tigray, di mana mekanisme seperti Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (Intergovernmental Authority on Development atau IGAD) dan upaya mediasi yang dipimpin Uni Afrika sangat penting.

Selain itu, *APSA Roadmap* menyoroti pentingnya koordinasi antara Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Regional (REC), dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama ini penting untuk menanggapi krisis antara TPLF dan Ethiopia, serta

²⁵ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*.

sejalan dengan keterlibatan Uni Afrika dalam negosiasi perdamaian dan upaya untuk menemukan solusi diplomatik. Singkatnya, *APSA Roadmap* menyediakan kerangka kerja untuk menilai respons Uni Afrika terhadap konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia, khususnya upaya manajemen krisis dan mediasi. Dengan menggunakan strategi dari APSA, penelitian ini mengkaji mengenai peran maupun tantangan Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.²⁶

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. *African Peace and Security Architecture (APSA)*

Constitutive Act of the African Union diadopsi pada tanggal 11 Juli 2000 saat KTT Biasa ke-36 OAU di Lome, Togo. Uni Afrika kemudian diluncurkan pada sebuah KTT yang diadakan di Durban, Afrika Selatan, pada tanggal 9 Juli 2002.²⁷ Para kepala negara dan Pemerintahan Afrika mengakui konsekuensi negatif dari konflik kekerasan terhadap masyarakat sipil dan dampaknya pada pembangunan sosial-ekonomi, sehingga Uni Afrika bertekad akan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di benua tersebut, dan mempromosikan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga demokrasi, partisipasi rakyat dan pemerintahan yang baik.

Penerapan undang-undang ini menandai perubahan radikal dari prinsip utama OAU tentang kedaulatan nasional dan non-intervensi dalam urusan nasional. Meski menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, undang-undang ini juga memberikan hak kepada Uni Afrika untuk melakukan campur tangan di negara anggota sehubungan dengan keadaan yang serius, yaitu kejahatan perang, genosida

²⁶ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*.

²⁷ Constitutive Act of African Union.

dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tertulis dalam pasal 4h.²⁸ Uni Afrika kemudian membentuk sebuah kerangka kerja guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Afrika, yang dikenal dengan *African Peace and Security Architecture*.

African Peace and Security Architecture (APSA) merupakan sebuah kerangka kerja yang dibentuk berdasarkan struktur, tujuan, prinsip, dan nilai, serta proses pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian krisis dan konflik, rekonstruksi pasca-konflik, dan pembangunan di kawasan Afrika. Kerangka kerja ini mencakup mekanisme untuk pencegahan konflik, manajemen krisis, rekonstruksi pasca-konflik, serta koordinasi dengan mitra regional dan internasional.²⁹ Pembentukan kerangka kerja APSA didasari oleh kombinasi teori-teori hubungan internasional modern serta nilai-nilai lokal Afrika yang dikenal sebagai pendekatan *African Way*.

Secara teoritis, APSA berakar pada konsep *keamanan kolektif* (*collective security*) yang menekankan bahwa ancaman terhadap perdamaian di satu negara merupakan ancaman bagi seluruh kawasan, sehingga diperlukan mekanisme bersama untuk mencegah dan merespons konflik.³⁰ Selain itu, APSA juga mengadopsi prinsip *Responsibility to Protect (R2P)*, khususnya melalui Pasal 4(h) *Constitutive Act of the African Union*, yang memberikan mandat kepada Uni Afrika untuk melakukan intervensi dalam kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

²⁸ Constitutive Act of African Union, Article 4(h).

²⁹ African Peace and Security Architecture: African Union's blue print for the promotion of peace, security and stability in Africa.

³⁰ Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union.

Teori *keamanan manusia (human security)* turut memperkuat fokus APSA pada perlindungan individu, bukan sekadar kedaulatan negara, yang tercermin dalam misi-misi perdamaian Uni Afrika seperti di Darfur dan Somalia. Di sisi lain, nilai-nilai Pan-Africanisme dan pemikiran *new regionalism* turut melandasi APSA sebagai wujud kemandirian Afrika dalam menangani konflik internal secara kolektif, tanpa ketergantungan pada aktor eksternal. Hal ini terlihat dalam prinsip normatif “*African solutions to African problems*” yang menjadi semangat utama dalam setiap intervensi Uni Afrika.

Berdasarkan *Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union* (Protokol terkait Pembentukan Dewan Perdamaian dan Keamanan tahun 2002),³¹ APSA merupakan agenda yang diperluas dan komprehensif untuk perdamaian dan keamanan yang mencakup pencegahan konflik (langsung dan struktural), peringatan dini dan diplomasi preventif, *peacemaking* dan *peacebuilding*, dorongan dan promosi praktik-praktik demokrasi, serta intervensi dan aksi kemanusiaan dan manajemen bencana.

Secara kelembagaan, kerangka APSA terdiri dari Peace and Security Council (PSC), African Standby Force (ASF), Continental Early Warning System (CEWS), Panel of the Wise, serta Peace Fund, yang semuanya dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, APSA bukan hanya refleksi dari teori-teori global, tetapi juga penguatan pendekatan lokal yang berbasis solidaritas, dialog, dan kepemilikan regional Afrika dalam mengelola perdamaian dan keamanan di benua tersebut.

31

APSA kemudian membentuk sebuah *roadmap* bernama *APSA Roadmap 2016-2020*, dengan tujuan dan prioritas yang jelas untuk tahun 2016-2020 dan strategi utama untuk mencapainya. *Roadmap* ini berfokus pada implementasi dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai. Prinsip lain yang menjadi panduan pengembangan *APSA Roadmap* adalah kebutuhan kuat akan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antara Uni Afrika, *Regional Economic Community* (REC), dan aktor internasional lainnya. *Roadmap* ini disusun berdasarkan lima strategi prioritas dengan tujuan luas yang jelas yang ditetapkan untuk setiap prioritas tematik yang mencakup siklus pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik, sebagaimana diuraikan dalam kerangka kerja berikut:³²

1. ***Conflict Prevention* (Pencegahan Konflik)**

Strategi pencegahan konflik melibatkan fokus langsung maupun operasional untuk melakukan intervensi sebelum kekerasan terjadi serta fokus sistematis dan strategis untuk mengatasi akar penyebab langsung dan penyebab konflik struktural. Tindakan pencegahan yang efektif adalah identifikasi faktor yang akurat dan penerapan gabungan tindakan pencegahan struktural dan langsung yang tepat waktu. Dalam konteks APSA, pengembangan dan implementasi EWS di Uni Afrika telah menjadi area aktivitas prioritas, yang ditandai dengan penguatan EWS yang ada, serta pengembangan kemampuan peringatan dini di beberapa REC yang tidak memiliki kemampuan ini.³³

Perkembangan ini telah dipandu oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatif, upaya non-duplikasi serta harmonisasi, koordinasi, dan

³² African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016*.

³³ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 23.

kolaborasi karena pencegahan konflik ditingkatkan dengan koordinasi melalui pengumpulan data kolaboratif dan analisis bersama oleh pemangku kepentingan APSA yang relevan. Inti dari pemenuhan APSA atas pencegahan langsung dan struktural adalah koordinasi dan kolaborasi antara EWS yang sudah ada dan/atau sedang dioperasikan di Uni Afrika dan REC, berbagai POW yang diberi mandat dengan tanggung jawab pencegahan konflik dan para pengambil keputusan tingkat tinggi yang di setiap lembaga diberi tanggung jawab pencegahan konflik.³⁴

Ada dua strategi utama untuk mencapai tujuan di atas, khususnya berkenaan dengan peningkatan frekuensi, relevansi, dan kemanjuran misi diplomasi preventif yang dilakukan oleh Uni Afrika. Di satu sisi, para pelaku yang terlibat dalam misi diplomasi preventif harus dilengkapi dengan keterampilan, kapasitas, dan dukungan yang relevan yang diperlukan untuk intervensi yang tepat waktu dan efektif. Lebih jauh, dan agar sistem diplomasi preventif yang lebih dapat diprediksi dan terpadu dapat dikembangkan, strategi di tingkat Uni Afrika diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antara PSC, Ketua, utusan khusus, perwakilan khusus, dan anggota POW.³⁵

Selain itu, pengembangan strategi diplomasi preventif dan mediasi terpadu (menangkap dua dimensi yang berbeda tetapi saling melengkapi) dianggap sebagai kegiatan prioritas. Sangatlah penting bagi Uni Afrika untuk mengembangkan tindakan penjangkauan dan informasi yang berfokus pada peran aktual mereka dalam pencegahan konflik langsung

³⁴ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 23-24.

³⁵ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 30.

serta mengembangkan strategi untuk penggalangan dana dan keberlanjutan.³⁶

2. *Crisis/Conflict Management (Manajemen Krisis/Konflik)*

Uni Afrika semakin gencar mengerahkan operasi dukungan perdamaian yang dipimpin Afrika sebagai respons terhadap situasi krisis dan konflik di seluruh kawasan. Meskipun kemauan politik untuk melaksanakan operasi semacam itu telah tumbuh pesat, kemampuan operasional untuk melakukannya masih memerlukan investasi yang signifikan. Guna memastikan bahwa operasi perdamaian Afrika dapat dikerahkan dengan cepat saat dibutuhkan dan efektif selama durasi pengerahan, kesiapan operasional ASF, dan perencanaan, pengelolaan, pengerahan, dan keberlanjutan operasi dukungan perdamaian Afrika, perlu ditingkatkan.³⁷

Meningkatnya peluang untuk menciptakan perdamaian oleh organisasi regional sub-regional, serta organisasi masyarakat sipil menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam intervensi mediasi di Afrika di berbagai tingkatan. Mediasi semakin banyak digunakan oleh PBB, Uni Afrika, dan di tingkat nasional sebagai pendekatan untuk penyelesaian sengketa dan konflik secara damai. Bentuk penciptaan perdamaian ini di sini dipahami sebagai proses terstruktur, yang melibatkan pihak ketiga yang bukan pihak dalam konflik, penerimaan mediasi dan mediator tertentu oleh

³⁶ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*.

³⁷ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 31.

pihak-pihak yang bersengketa, dan sifat sukarela dari kesepakatan yang dicapai.³⁸

Sebagaimana dicatat dalam penilaian APSA 2014, di sebagian besar konflik besar di Afrika, Uni Afrika telah terlibat langsung dalam mediasi atau mendukung mediasi yang dipimpin oleh salah satu REC. Antara tahun 2007 dan 2014, Uni Afrika mengerahkan utusan khusus, perwakilan khusus, atau mediator ke Guinea, Madagaskar, Guinea-Bissau, Komoro, Niger, Burundi, Republik Afrika Tengah, Somalia, Sudan, Kawasan Danau Besar, Liberia, dan Mali. Pentingnya, kompleksitas, dan kesulitan mediasi dan diplomasi preventif memerlukan pendekatan yang sistematis dan profesional, yang memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara para pelaku serta keahlian dan dukungan profesional tingkat tinggi. Selain itu, untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara Uni Afrika dan PBB terkait mediasi, Uni Afrika berkolaborasi melalui dukungan teknis dan pertukaran pengalaman, serta memperkuat penyelarasan pedoman mediasi PBB dan Uni Afrika.³⁹

3. *Post-Conflict Reconstruction and Peace Building* (Rekonstruksi dan Pembangunan Perdamaian Komprehensif Pasca Konflik)

Strategi prioritas yang ketiga ini terkait erat dengan semua elemen APSA lainnya dan menjadi pusat keberhasilannya. Berulangnya kembali konflik yang dihadapi beberapa negara pasca-konflik baru-baru ini ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan menyoroti tantangan, dan oleh karena itu, keharusan untuk rekonstruksi dan pembangunan pascakonflik di Afrika,

³⁸ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 31.

³⁹ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 38.

serta perlunya tindakan yang lebih terpadu dalam mengonsolidasikan perdamaian di negara-negara yang baru saja keluar dari konflik.⁴⁰

Mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dalam membangun kembali negara-negara yang baru saja keluar dari konflik, pada tahun 2006 Majelis Uni Afrika mengadopsi Kerangka Kebijakan PCRDR (*Post Conflict Reconstruction and Development policy*), sebagai panduan untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengonsolidasikan perdamaian dan membuka jalan bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang baru saja keluar dari konflik.⁴¹ Kebijakan tersebut menyoroti enam elemen indikatif PCRDR, yaitu keamanan, bantuan kemanusiaan/darurat, rekonstruksi dan pembangunan sosial-ekonomi, tata kelola dan transisi politik, hak asasi manusia, keadilan dan rekonsiliasi, serta gender.

4. *Strategic Security Issues (Isu-isu Keamanan Strategi)*

Berdasarkan gagasan luas tentang keamanan manusia, kawasan Afrika seringkali menghadapi serangkaian tantangan keamanan strategis. Masalah yang diidentifikasi meliputi upaya yang tidak memadai dan terputus-putus untuk mengatasi aliran gelap *small arms and light weapons* (SALW), ranjau, bahan peledak, alat peledak rakitan, terorisme, maupun kejahatan terorganisasi.⁴²

5. *Coordination and Partnership (Koordinasi dan Kemitraan)*

⁴⁰ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 39.

⁴¹ African Union: Policy on Post-Conflict Reconstruction and Development (PCRDR).

⁴² African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 46.

Pada tingkat kebijakan, implementasi APSA akan dipandu di bawah kepemimpinan African Union Commission (AUC). Mengikuti peran harmonisasi AUC, implementasi APSA didasarkan pada kolaborasi dan koordinasi yang efektif dari beberapa aktor, termasuk Uni Afrika, negara anggota, serta mitra lainnya. Lebih jauh, untuk operasionalisasi yang efektif dari kapasitas yang dibutuhkan untuk pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian konflik di setiap lembaga pemangku kepentingan, pengembangan intra-organisasi yang cukup besar tetap menjadi prioritas.⁴³ Oleh karena itu, operasionalisasi penuh APSA didasarkan pada kolaborasi dan koordinasi (antar dan intra kelembagaan) sebagai salah satu prioritas yang harus ditangani dengan perhatian penuh.

Strategi yang direncanakan untuk mengatasi penyebab masalah ini ada dua. Pertama, mobilisasi sumber daya oleh negara anggota akan difasilitasi melalui penerapan Protokol PSC Pasal 8 Ayat 5 mengenai pembentukan Komite Mobilisasi Sumber Daya. Kedua, anggaran Uni Afrika yang terperinci (termasuk versi yang direvisi atau diamandemen) akan dipublikasikan sebagai bagian dari dokumentasi Sidang Uni Afrika, rencana kegiatan tahunan yang terperinci mengenai program/proyek yang akan didanai dari *peace fund* akan dikembangkan, mekanisme tinjauan tahunan yang kuat akan diperkenalkan, dan studi ahli mengenai penggalangan dana dari sektor swasta dan industri ekstraksi berbasis sumber daya akan ditugaskan.⁴⁴

⁴³ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 54.

⁴⁴ African Peace and Security Architecture, *APSA Roadmap 2016-2020*, 59.

Penggunaan APSA sebagai konsep utama dalam penelitian ini didasarkan pada peran sentralnya sebagai kerangka operasional resmi Uni Afrika dalam menangani isu-isu perdamaian dan keamanan di kawasan Afrika. APSA tidak hanya merepresentasikan kebijakan luar negeri kolektif negara-negara Afrika, tetapi juga mencerminkan pendekatan khas Afrika dalam menyelesaikan konflik, melalui mediasi, diplomasi preventif, dan solusi regional yang bersifat kontekstual. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip “*African solutions to African problems*,” yang menjadi fondasi moral dan politik dari Uni Afrika sejak reformasi dari OAU.

Strategi yang dimiliki oleh APSA ini tidak harus selalu dilaksanakan secara berurutan, tetapi dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan konteks dan kebutuhan situasi yang dihadapi. Sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis, APSA dirancang agar pendekatannya integratif dan adaptif, sehingga memungkinkan respons yang lebih efektif terhadap perkembangan konflik. Dalam banyak kasus, strategi APSA perlu diterapkan secara tumpang tindih atau simultan.

Fleksibilitas APSA juga terlihat dalam sistem peringatan dini (Early Warning System), yang memungkinkan langkah-langkah pencegahan konflik melalui diplomasi preventif atau mediasi segera diambil begitu potensi konflik terdeteksi. Namun, jika konflik telah pecah, fokus dapat beralih ke upaya penghentian kekerasan, mediasi, atau pengerahan misi perdamaian, sebelum kemudian melanjutkan dengan rekonstruksi pasca-konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu formula tetap dalam penerapan APSA, melainkan strategi yang harus disesuaikan dengan karakteristik konflik dan kebutuhan lokal di setiap negara. Dengan demikian, APSA bukan hanya sebuah

kerangka kerja yang sistematis, tetapi juga mekanisme yang fleksibel dan responsif dalam menangani tantangan perdamaian dan keamanan di Afrika.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam mengumpulkan data dari sumber ilmiah dengan tujuan untuk memahami isu apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁵ Metode kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik antara *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) dan Pemerintah Ethiopia adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.⁴⁶

⁴⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

⁴⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2) (2005): 58.

1.8.2. Batasan Masalah

Pemberian batas masalah berfungsi untuk menspesifikasikan penelitian agar lebih jelas, terarah dan fokus kepada pokok permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi penelitian pada periode waktu tahun 2020 hingga 2024. Batasan waktu ini dipilih untuk fokus pada dinamika konflik dan proses penyelesaian selama masa tersebut, termasuk peran Uni Afrika dalam memediasi perjanjian damai tahun 2022 dan langkah-langkah rekonsiliasi pasca-konflik. Fokus utama akan diarahkan pada peran Uni Afrika sebagai aktor regional yang mengimplementasikan strategi prioritas dari *African Peace and Security Architecture* (APSA), sementara keterlibatan aktor lain, seperti PBB atau Eritrea, hanya akan dibahas dalam kaitannya dengan konflik maupun peran Uni Afrika.

1.8.3. Unit dan tingkat Analisis

Unit analisis merupakan sebuah objek atau unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, ataupun diramalkan. Unit ini juga disebut sebagai variabel dependen.⁴⁷ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah peran yang dilakukan Uni Afrika. Selanjutnya, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam hal ini yang menjadi unit eksplanasi adalah konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.

Tingkat analisis menurut David Singer adalah cakupan target analisis dimana penulis dapat memperoleh gambaran, penjelasan dan perkiraan yang akan membantu peneliti.⁴⁸ Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat **negara**

⁴⁷ Mas'ood, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES), 1990.

⁴⁸ David J Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14(1): 82-83.

dimana asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih melihat kepada peran yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam konflik yang terjadi antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses mendapatkan dan mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁴⁹ Penelitian penulis sendiri menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penulis akan menggunakan sumber data sekunder seperti dokumen resmi pemerintah atau organisasi regional, artikel atau jurnal ilmiah, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan adalah terkait penyelesaian konflik yang terjadi antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia, mulai dari awal konflik hingga pasca konflik. Selain itu penulis juga menggunakan dokumen-dokumen, seperti *Constitutive Act of African Union* yang berisi mandat Uni Afrika sebagai organisasi regional untuk menjaga kestabilan kawasan dan negara-negara anggotanya dan *Permanent Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia. Penulis juga menggunakan *2002 Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union* untuk menjelaskan proses pembentukan dan peran dari APSA. Selain itu, data yang dikumpulkan bersumber artikel berita dan laporan yang berhubungan dengan peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Rajawali), 71-74.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penginterpretasian dan pengelompokan data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan pencarian dan identifikasi pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang kemudian menjadi dasar penarikan kesimpulan.⁵⁰ Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data terdiri dari: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵¹ *Data reduction* yakni merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan penelitian, *data display* yakni penyajian data yang telah terorganisasi sehingga lebih mudah dipahami, dan yang terakhir *conclusion drawing/verification*, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis melakukan analisis data melalui beberapa tahap. Tahap pertama, penulis mengumpulkan data-data dan juga fakta untuk mendukung pertanyaan penelitian nanti. Data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder kemudian direduksi, dijabarkan pada unit-unit dan kemudian disusun ke dalam pola dan memilih yang mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga didapatkan kesimpulan dan verifikasi. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi, data-data terkait peran Uni Afrika nantinya diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh penulis dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh peneliti. Dari data yang telah didapatkan, penulis juga menjelaskan dinamika konflik yang terjadi antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia, lalu data tersebut

⁵⁰ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (California: Sage Publication 1999):150.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

diinterpretasi dengan strategi prioritas yang ada dalam kerangka kerja APSA yang dibuat oleh Uni Afrika. Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Uni Afrika dalam melakukan *peacebuilding* dalam konflik antara etnis Tigray dan Pemerintah Ethiopia. Penulis pada akhirnya dapat menalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh penulis sebagai hasil dari penelitian ini.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

BAB II DINAMIKA KONFLIK TPLF DAN PEMERINTAH ETHIOPIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia, yang meliputi sejarah dan perkembangan politik di Ethiopia, akar penyebab konflik, dampak, serta aktor eksternal yang terlibat dalam konflik.

BAB III UNI AFRIKA SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL DI KAWASAN AFRIKA

Bab ini akan fokus pada Uni Afrika sebagai organisasi regional, dengan menjabarkan mengenai profil Uni Afrika, seperti sejarah dan tujuan terbentuknya, keanggotaan, serta program dan inisiatif organisasi ini. Selain itu, bab ini juga akan

menjabarkan mengenai rekam jejak keberhasilan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik-konflik di kawasan Afrika.

BAB IV ANALISIS PERAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA *TIGRAY PEOPLE'S LIBERATION FRONT (TPLF)* DAN PEMERINTAH ETHIOPIA

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil analisis mengenai peran Uni Afrika sebagai fasilitator, mediator, rekonsiliator, monitor dan verifikator, dalam konflik yang terjadi antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia berdasarkan lima strategi prioritas APSA. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai *current situation* di Tigray dan Ethiopia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan terkait topik penelitian serta saran penulis sebagai hasil dari penelitian.

